



Evaluasi Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar

I Putu Adi Suardika

Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar-Indonesia

Correspondence E-mail: adisuardika27@gmail.com

How to Cite: Suardika, I. P. A. (2020). Evaluasi Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2): 145-151

Abstract

The issuance of Law No. 6 of 2014 about villages make villages have autonomy to regulate and run their own government, and this is followed by a series of funding received by the village. Villages are required to use village funds for productive economic development according to their potential. In line with this policy, in 2017 the Gianyar Regency Government established 9 tourist villages. One of them is Kerta Village, which is developing new rural-based tourist destinations. This study aims to evaluate the development of a tourist village in Kerta Village and the strategies that can be taken in developing a tourist village. Data collection was carried out by field studies, namely observation techniques, in-depth interviews, and documentation studies. The data analysis used a qualitative descriptive method. The results of the study found that the development of the Kerta tourism village was not optimal. Even though Kerta Village has been able to realize new tourist village destinations, its development has not been effective and efficient. The development strategy that must be carried out in order to become a developed rural tourism destination is to develop integrated tourism in a collaborative / partnership manner, increase promotion, highlight uniqueness, and build an image.

Keywords: Evaluation, Tourism Village, Development strategy

Abstrak

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat desa memiliki otonomi untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan sendiri, dan hal ini diikuti dengan serangkaian pendanaan yang diterima desa. Desa wajib menggunakan dana desa untuk pembangunan ekonomi produktif sesuai dengan potensinya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Gianyar menetapkan 9 desa wisata. Salah satunya Desa Kerta yang sedang mengembangkan destinasi wisata baru berbasis pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengembangan desa wisata di Desa Kerta dan strategi yang dapat diambil dalam pengembangan desa wisata. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yaitu teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengembangan desa wisata Kerta belum optimal. Meski Desa Kerta telah mampu mewujudkan destinasi desa wisata baru, namun perkembangannya belum efektif dan efisien. Strategi pengembangan yang harus dilakukan untuk menjadi desa tujuan wisata yang berkembang adalah mengembangkan pariwisata terpadu secara kolaboratif / kemitraan, meningkatkan promosi, menonjolkan keunikan, dan membangun image.

Kata kunci: Evaluasi, Desa Wisata, Strategi pembangunan

1. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti menjadi angin segar bagi pemerintah desa. Kedudukan desa yang sebelumnya merupakan organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*) berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 kini kedudukan desa adalah sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self*

government community dan *local self government* (Eko, 2014). Kewenangan yang diberikan kepada Desa diikuti dengan bantuan keuangan yang sangat besar yaitu dana desa.

Dana Desa merupakan *instrument* keuangan yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk membiayai segala urusan pengelolaan desa termasuk urusan pembangunan di desa. Dalam penggunaan dana ini kemudian diatur setiap tahunnya berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi. Mulai tahun 2018 kemudian penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi produktif desa.

Produk unggulan desa merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan desa serta mengurangi arus urbanisasi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melihat potensi desa-desa yang ada di Indonesia tentu sangatlah beragam. Provinsi Bali sebagai daerah tujuan pariwisata yang sangat terkenal di mancanegara juga melirik desa wisata sebagai trobosan baru untuk menjawab kebutuhan wisatawan. Hal ini dibuktikan lewat Program membangun 100 desa wisata dengan pemerintah provinsi sebagai pembina yang dirintis sejak tahun 2013 (Kusuma, 2017).

Kabupaten Gianyar salah satunya, berusaha untuk menerjemahkan arah kebijakan pengembangan desa wisata di Bali dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Desa Wisata sebagai upaya untuk memberikan legalitas hukum kepada desa yang berkeinginan untuk ditetapkan sebagai desa wisata. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Gianyar dimulai pada tahun 2017 setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 429/E02/Hukum/2017 tentang penetapan sembilan desa wisata di Kabupaten Gianyar. Kesembilan desa yang ditetapkan adalah Desa Kenderan, Kedisan, Kerta, Taro, Singapadu Kaler, Singapadu Tengah, Kemenuh, Mas, dan Desa Batubulan.

Desa Kerta adalah salah satu Desa yang ditetapkan menjadi Desa Wisata berdasarkan keputusan Bupati Gianyar. Desa ini adalah satu-satunya desa yang ditetapkan menjadi desa wisata tanpa ada obyek wisata yang sebelumnya *eksis* di kawasan Desa. Hal ini tentu menjadi pertanda bahwasanya Desa Wisata ini dimulai dari nol berbeda dengan desa wisata lain seperti Desa Taro yang sebelum ditetapkan menjadi Desa Wisata sebelumnya telah ada obyek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan

Desa wisata Kerta sampai akhir tahun 2019 belum bisa berjalan dengan optimal dan menunjang pendapatan asli desa (PAD). Belum banyak program trobosan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Desa Kerta maupun Pemerintah Kabupaten Gianyar seperti promosi, pelatihan untuk pengelola desa wisata dan lain sebagainya menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pengembangan desa wisata.

2. Kajian Pustaka

Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut (Dunn, 2003). Kriteria-kriteria ini adalah 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Perataan, 5) Responsivitas, 6) Ketepatan.

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan

tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien

Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi

Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan suatu destinasi pariwisata harus ada empat unsur yaitu *Attraction*, *Amenities*, *Access*, *Ancillary services* yang disingkat dengan formulasi 4A (Chris Cooper, John Fletcher, David Gilbert, Alan Fyall, 1993)

Attractions

Attractions adalah hasil dari buatan manusia, keindahan alam ataupun *event* yang menjadi motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Pada umumnya atraksi terpisah dari industri pariwisata berdasarkan kepemilikannya. Untuk pengembangan pariwisata di masa depan akan dibutuhkan ahli khusus untuk mengelola atraksi (*management of attractions*).

Amenities

Amenities adalah pendukung pariwisata berupa fasilitas dan layanan dalam suatu destinasi.

Hal ini sangat berkaitan dengan sektor lainnya. Contohnya jumlah kamar di hotel akan dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke hotel tersebut. Adapun bentuk dari amenities seperti: akomodasi, *food and beverage service*, retail dan jasa lainnya.

Access

Access adalah suatu sistem untuk mengefisienkan transportasi mulai dari akomodasi menuju atraksi dan sebaliknya. Sistem tersebut dapat berupa jalur bersepeda, bus, dan transport lainnya.

Ancillary services

Ancillary services melingkupi pemasaran, pengembangan dan koordinir aktivitas wisata. Organisasi ini dapat berupa organisasi publik/pemerintah dan swasta. Beberapa organisasi dapat mencakup regional ataupun nasional

Analisis SWOT

Menurut (John Pearce dan Richard B. Robinson, 1997), yang dimaksud faktor-faktor analisis SWOT adalah:

- Kekuatan (strengths). Kekuatan adalah sumber daya keterampilan atau keunggulan lain terhadap pesaing atau kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan.
- Kelemahan (weakness). Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja.
- Peluang (opportunity). Peluang merupakan situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan.
- Ancaman (threats). Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan

3. Hasil dan Pembahasan

Desa wisata Kerta yang telah dikembangkan mulai tahun 2016 telah berhasil meningkatkan perkonomian masyarakat hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata ini. Kendati kemudian secara kuantitas masih minim, namun dampak-dampak yang tidak bisa dihitng seperti inovasi masyarakat, peningkatan SDM masyarakat sampai pada pelestarian warisan budaya yang ada adalah dampak baik dari kebijakan ini

Penetapan Desa Wisata: Minimnya Perangkat Seleksi dan Kelatahan Desa

Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Gianyar mulai dilakukan pada tahun 2017 dengan penetapan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 429/HK/01/2017 pada tanggal 28 Pebruari 2017 yang menetapkan sembilan desa wisata. Penetapan desa wisata ini ternyata belum bisa berjalan dengan optimal dengan berbagai hambatan yang dihadapi oleh masing-masing desa wisata

Ditengah masih terhambatnya pengembangan desa wisata, Pemerintah Kabupaten Gianyar malah menetapkan sepuluh desa wisata baru pada tahun 2019 dengan dikeluarkanya SK nomor 707/E-02/HK/2019 dan tambahan lima desa wisata baru di tahun 2020 sehingga total desa wisata yang telah ditetapkan di Kabupaten Gianyar berjumlah 24 desa wisata

Penetapan desa wisata yang terus dilakukan setiap tahun ditengah terhambatnya pengembangan desa wisata yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah akibat minimnya perangkat seleksi dinas pariwisata serta besarnya desakan dari desa yang ingin desanya ditetapkan sebagai desa wisata

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh masing-masing desa yang ditetapkan menjadi desa wisata pada tahun 2017. Potensi yang dimiliki tidak berbeda jauh, hampir semua desa menonjolkan daya tarik wisata alam dan wisata budaya yang dimiliki. Hal ini tentu tidak memberikan kesan perbedaan

dan keunikan antara satu desa wisata dengan desa wisata lainnya. Penambahan desa wisata yang dilakukan secara terus menerus dengan potensi yang tidak berbeda jauh dengan desa wisata yang telah ditetapkan sebelumnya tentu akan semakin menghambat perkembangan desa wisata yang ada

Pengembangan Desa Wisata Kerta, Kolaborasi Desa dan Desa Adat

Dalam merealisasikan tujuan menjadi desa wisata, pada tahun 2016 Desa Kerta melakukan perjanjian kerjasama dengan Desa Adat Pilan guna melakukan pengembangan wisata di daerah tersebut dengan membangun Bumi Perkemahan Pucak Sari. Bumi perkemahan ini adalah produk unggulan yang ditawarkan kepada wisatawan di Desa Wisata Kerta

Dalam perjalanannya desa wisata kerta telah dikunjungi oleh wisatawan sehingga menghasilkan dampak peningkatan perekonomian kepada masyarakat yang ada disekitarnya. Hal ini diakibatkan karena dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di bumi pekemahan pucak sari penyediaan makanan, kayu bakar serta oleh-oleh yang dibawa pulang oleh wisatawan semuanya disediakan oleh masyarakat lokal Desa Kerta yang berada disekitar lokasi Bumi Perkemahan Pucak Sari

Perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan melibatkan desa adat merupakan peluang dalam pelestarian potensi-potensi yang ada di Desa Kerta. Potensi yang ada hampir seluruhnya merupakan aset Desa Adat dengan pengelolaan secara tradisional oleh masyarakat adat. Masuknya desa dalam upaya pelestarian ini adalah sebuah hasil yang diperoleh sebagai akibat dari pengembangan desa wisata di Desa Kerta.

Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Desa

Dalam kurun waktu 2016-2018 ini, dalam rangka pengembangan desa wista, Desa Kerta telah mengeluarkan anggaran mencapai Rp. 859.137.013 jumlah anggaran ini belum termasuk kemudian biaya petugas jaga di bumi perkemahan yang masih ditanggung dalam APBDes setiap tahunnya.

Pengeluaran anggaran yang besar ini ternyata tidak diikuti dengan pendapatan yang besar. Dalam laporan tahunan BUMDes Kerta Sedana Desa Kerta tahun 2019 pendapatan Desa Wisata Kerta mencapai Rp. 13.672.000, dimana jumlah pendapatan ini diperoleh dari kunjungan wisatawan pada bulan Januari sebesar Rp. 788.000, Pebruari Rp.1.300.000, Juni Rp. 2.190.000, Juli Rp. 2.104.000, Agustus Rp. 408.000, November Rp. 760.000, dan bulan Desember sebesar Rp. 6.082.000.

Jumlah ini kemudian dikelola dibawah naungan BUMDes Kerta Sedana yang digunakan untuk biaya kewajiban operasional sebesar Rp. 8.400.000 bagi hasil kepada Desa Adat sebesar Rp. 4.101.000 dan hasil bersih dari pengelolaan desa wisata yang masuk ke PAD hanya sebesar Rp. 1.171.000

Kecukupan Sasaran Kebijakan dan Pemerataan Pembangunan

Kecilnya pemasukan yang diterima dari kegiatan desa wisata kerta, mencerminkan bahwa kebijakan desa wisata kerta ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan semua pihak yang berusaha dijangkau dari adanya kegiatan desa wisata kerta ini. Dampak berupa pemenuhan kecukupan ekonomi, pelestarian potensi masih hanya dirasakan oleh beberapa pihak yang lokasinya berdekatan dengan bumi perkemahan pucak sari

Sebaran Desa wisata yang ditonjolkan di Desa Kerta sampai saat ini masih hanya berfokus di satu banjar dari 8 banjar dinas yang ada di Desa Kerta, yaitu di Banjar Pilan. Pengembangan desa wisata Kerta masih hanya berfokus di Bumi Perkemahan Pucak Sari yang berada di Banjar Pilan. Terfokusnya pengembangan ini juga berdampak pada terfokusnya manfaat yang diterima oleh masyarakat. Sebaran penerima manfaat dari kebijakan faktanya belum merata mencakup keseluruhan banjar yang ada di Desa Kerta.

Terfokusnya pengembangan desa wisata di Banjar Pilan terbilang cukup beralasan karena kemudian ditempat ini juga dikembangkan Kebun Raya Gianyar yang menjadi ikon baru di Kabupaten

Gianyar. Desa Kerta dengan adanya pengembangan kebun raya berusaha ikut mengambil keuntungan dengan pengembangan desa wisata di lokasi yang sama

Pemberdayaan Masyarakat: Modal Besar Pembangunan di Desa

Respon masyarakat desa kerta dalam mendukung pengembangan desa wisata kerta sangatlah Mulai dari proses perencanaan dalam setiap musyawarah desa maupun musyawarah banjar, dalam pembangunan sarana dan prasarana, sampai pengelolaan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam proses pembangunan sarana dan prasarana masyarakat terlibat langsung baik sebagai pekerja maupun tim pelaksana kegiatan. Hal inilah yang mencerminkan sinergi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam mendukung upaya pengembangan desa wisata

LPM adalah lembaga desa yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat dalam setiap pembangunan di Desa. Lewat peran lembaga inilah masyarakat diwadahi dalam partisipasi pembangunan di Desa. Baiknya respon masyarakat tentu tidak terlepas dari baiknya kinerja LPM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu pemberdayaan masyarakat adat lewat kerjasama dalam pengelolaan lahan adat menjadi kunci lain suksesnya pemberdayaan masyarakat di Desa Kerta dalam rangka mendukung pengembangan desa wisata. Selain itu pelibatan berbagai Lembaga-lembaga adat seperti Pecalang maupun Sekhaa yang lain dalam banyak kegiatan adalah bentuk-bentuk dukungan yang besar dari berbagai lapisan masyarakat

Kehadiran masyarakat dalam mendukung kegiatan pengembangan desa wisata juga terlihat dalam struktur keanggotaan Pokdarwis Desa Kerta yang berasal dari perwakilan masyarakat yang berasal dari semua wilayah banjar. Pokdarwis inilah kemudian yang dilibatkan dalam pengelolaan desa wisata kendati tidak secara tetap bekerja di unit desa wisata. Kehadiran Pokdarwis adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga dan melestarikan potensi-potensi pariwisata yang ada di Desa Kerta

Desa Wisata: Upaya Menjawab Harga Jual Komoditas Pertanian yang Rendah

Trobosan inovasi kebijakan berupa pengembangan desa wisata adalah alternatif yang bisa ditempuh apalagi melihat potensi pariwisata berupa kebudayaan, *landscape* alam, serta potensi alam lain yang sangat bisa dikembangkan menjadi hal mendasar dilakukannya pengembangan desa wisata Kerta

Pergeseran trend minat wisatawan dalam berwisata yang belakang lebih cenderung kembali ke wisata alam yang masih alami salah satunya adalah desa wisata menjadi hal positif yang menjadi pertanda cocoknya kebijakan desa wisata ini. Pergeseran *trend* wisata ini ditandai dengan. Banyaknya desa-desa yang berlabel desa wisata. Dalam perkembangannya banyak kemudian desa yang sukses melakukan pengembangan desa wisata dan mengantar desanya menjadi desa mandiri. Hal ini tentu bisa dijadikan rujukan dalam rangka pengembangan wilayah Desa Kerta.

Dampak yang dirasakan sebagai akibat adanya pengembangan desa wisata seperti penjualan komoditas pertanian kepada wisatawan dengan harga yang lebih tinggi adalah sebagian kecil dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat. Kendati kemudian dampak yang dirasakan ini belum merata keseluruh wilayah desa namun sinyal baik dan ketepatan dari kebijakan ini telah mulai dirasakan oleh masyarakat Desa Kerta. Peluang-peluang ini, kedepan harus lebih dielaborasi dan dimanfaatkan oleh pengelola desa wisata Kerta. Apalagi dengan antusias masyarakat dalam mendukung kebijakan ini adalah modal besar yang bisa dimanfaatkan

Strategi Pengembangan Desa Wisata Kerta

Dengan menggunakan analisis SWOT yang telah dituangkan dalam matriks analisis yang mencakup penjabaran terhadap kekuatan, kelemahan, ancaman dan tantangan pengembangan Desa

Wisata Kerta. Dari matriks ini penulis menghadirkan empat set kemungkinan alternatif strategis yang bisa dilakukan dalam rangka pengembangan desa wisata Kerta yaitu:

- Promosi-promosi kepada wisatawan dengan memanfaatkan berbagai *flatfrom* diikuti dengan kreatif branding desa wisata Kerta
- Membatasi eksploitasi sumberdaya alam di Desa Kerta dan promosi yang dilakukan perlu menggali ke-unikan desa yang bertujuan membentuk karakteristik dari desa wisata Kerta
- Membangun citra tersendiri yang khas dari Desa Wisata Kerta untuk menempati posisi tertentu dalam benak pengunjung
- Melakukan kerjasama dalam berbagai pembangunan sarana pendukung dan SDM kepariwisataan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten

4. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah Pengembangan desa wisata Kerta belum optimal. Walaupun Desa Wisata Kerta telah mampu mewujudkan destinasi wisata baru, namun belum efektif dan efisien. Kurang efektifnya pengembangan Desa Wisata Kerta diindikasikan oleh dampak ekonomi, sosial dan budaya terhadap masyarakat relative kecil dan tidak merata. Pengembangan Desa Wisata Kerta kurang efisien dapat dilihat dari besarnya investasi tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Strategi yang mesti dilakukan dalam pengembangan desa wisata Kerta sebagai destinasi wisata desa yang maju adalah dengan membangun wisata terintegrasi secara kolaboratif/kemitraan, dengan meningkatkan promosi, menonjolkan keunikan komoditas produk yang diunggulkan, dan membangun citra desa yang positif.

Daftar Pustaka

- Chris Cooper, John Fletcher, David Gilbert, Alan Fyall, S. W. (1993). *Tourism Principles & Practice*. United Kingdom: Longman Group Limited.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedu). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Academia.Edu*. <https://doi.org/10.1038/ncomms12854>
- John Pearce dan Richard B. Robinson. (1997). *Manajemen Strategi Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Kusuma, B. (2017). Bali Genjot 100 Desa Wisata Tahun Ini Halaman all - Kompas. *Kompas*. Retrieved from <https://travel.kompas.com/read/2017/02/21/091700927/bali.genjot.100.desa.wisata.tahun.ini?page=all>